

Model Manajemen POAC dalam Layanan Bimbingan dan Konseling: Tinjauan Sistematis Terhadap Efektivitas Implementasi di Sekolah

Reizki Maharani¹, Firman², Neviyarni³

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

^{2,3} Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: reizkimaharani@uin-suska.ac.id¹, firman@fip.unp.ac.id²,
neviyarni.suhaili911@gmail.com³

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berfokus pada manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) yang diakui sebagai kerangka kritis untuk mengoptimalkan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Meskipun pentingnya manajemen ini, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan signifikan, seperti kurangnya sumber daya, pelatihan yang tidak memadai, dan resistensi terhadap perubahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang mencakup analisis berbagai sumber terkait implementasi POAC dalam konteks BK. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa untuk mencapai efektivitas dalam layanan BK, diperlukan integrasi teknologi yang memadai, pelatihan manajerial bagi guru BK, serta kebijakan sekolah yang mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi manajemen POAC tidak hanya bergantung pada teori, tetapi juga pada praktik yang relevan dan dukungan dari seluruh pihak terkait di lingkungan sekolah. Dengan demikian, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang ada demi meningkatkan kualitas layanan BK.

Kata kunci: BK Sekolah, Efektivitas Implementasi, Layanan BK, Manajemen POAC.

POAC Management Model in Guidance and Counseling Services: A Systematic Review of Implementation Effectiveness in Schools

Abstract

The background of this research focuses on POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) management, recognized as a critical framework for optimizing Guidance and Counseling (GC) services in schools. Despite its importance, field implementation faces significant challenges, including resource shortages, inadequate training, and resistance to change. This study employs a literature review method, analyzing various sources related to POAC implementation in GC contexts. Results indicate that achieving effectiveness in GC services requires adequate technology integration, managerial training for GC teachers, and supportive school policies. The conclusion affirms that successful POAC management implementation relies not only on theory but also on relevant practices and support from all stakeholders in the school environment. Thus, strategic steps must address existing challenges to enhance GC service quality.

Keywords: School BK, Implementation Effectiveness, BK Services, POAC Management.

PENDAHULUAN

Layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa, baik secara akademis maupun sosial. Namun, banyak sekolah yang masih menerapkan manajemen BK dengan cara yang tidak terstruktur. Hal ini dapat mengakibatkan layanan BK yang tidak terukur dan minim akuntabilitas. Menurut Syahri (2024), kurangnya sistem manajemen yang baik dalam layanan BK dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti tingginya angka siswa yang tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Hifsy (2022) juga menegaskan bahwa tanpa adanya pengelolaan yang efisien, layanan BK akan sulit untuk dinilai efektivitasnya.

Temuan kritis dari Risalah (2024) menunjukkan bahwa sekitar 85% guru BK di Indonesia tidak terlatih dalam teknik POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru BK, yang berpotensi mengurangi kualitas layanan yang mereka berikan kepada siswa. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai urgensi manajemen BK yang terstruktur agar dapat memberikan layanan yang optimal bagi siswa.

Selain itu, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) menunjukkan bahwa banyak sekolah di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan program-program BK yang efektif. Dengan adanya manajemen yang buruk, alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, dan banyak program yang dirancang tidak dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada perhatian lebih terhadap pengembangan model manajemen BK yang terstruktur untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Model manajemen POAC muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah dalam layanan BK di sekolah. Kerangka POAC Plus yang dikembangkan oleh Prayitno (2018) menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi untuk sinkronisasi program berbasis kebutuhan siswa. Dengan menggunakan model ini, sekolah dapat merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengontrol layanan BK dengan lebih efektif.

Bukti empiris menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen POAC dapat menurunkan 30% kasus siswa yang tidak tertangani. Asni et al. (2024) dalam penelitian mereka menemukan bahwa sekolah yang menerapkan model POAC dalam manajemen BK mengalami peningkatan signifikan dalam kualitas layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa POAC bukan hanya sekadar teori, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan sukses di lapangan.

Lebih lanjut, POAC juga memberikan kerangka kerja yang jelas bagi guru BK untuk merencanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan adanya perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, serta pengendalian yang ketat, sekolah dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Selain itu, model ini juga memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap efektivitas program yang telah dijalankan.

Dalam konteks global, banyak negara lain yang telah berhasil menerapkan model manajemen serupa dalam layanan bimbingan dan konseling. Misalnya, di Malaysia, penelitian oleh Ewe dan Ng (2022) menunjukkan bahwa penerapan fungsi POAC dalam manajemen konseling di sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan secara signifikan. Hal

ini memberikan gambaran bahwa model POAC dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks yang berbeda, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, penerapan model manajemen POAC dalam layanan BK di sekolah bukan hanya sekadar pilihan, tetapi merupakan langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan siswa secara lebih efektif.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bukti empiris yang mendukung efektivitas model manajemen POAC dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan fungsi POAC dapat meningkatkan kualitas layanan BK secara signifikan. Misalnya, Pratiwi dan Mulyono (2023) menemukan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip POAC mengalami peningkatan dalam kepuasan siswa terhadap layanan konseling, dengan tingkat kepuasan mencapai 85%.

Data empiris juga menunjukkan bahwa penerapan model ini dapat mengurangi masalah perilaku siswa. Sebuah studi oleh Nugroho et al. (2021) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan manajemen POAC berhasil menurunkan tingkat pelanggaran disiplin siswa hingga 20%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang baik, layanan BK dapat berfungsi lebih efektif dalam menangani masalah siswa.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas model POAC. Indikator tersebut meliputi tingkat partisipasi siswa dalam program bimbingan, peningkatan hasil akademis, serta umpan balik dari siswa dan orang tua mengenai layanan yang diberikan. Dengan menganalisis data-data ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas model POAC dalam konteks layanan BK di sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi literatur deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis pengetahuan atau temuan yang telah ada yang berkaitan dengan manajemen POAC dalam layanan bimbingan dan konseling, berdasarkan sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen ilmiah lainnya.

Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas implementasi model manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) dalam layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah. Tinjauan literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis artikel-artikel yang relevan yang diterbitkan dalam periode 2018 hingga 2024. Metodologi ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan POAC dalam konteks BK, serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari berbagai penelitian sebelumnya. Menurut Creswell (2021), tinjauan literatur yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi celah dalam penelitian yang ada dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup database akademik seperti Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ), dan Garuda (Assingkiy, 2021). Database ini dipilih karena menyediakan akses ke berbagai artikel ilmiah yang terindeks, yang menjamin kualitas dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah artikel yang telah

melalui proses peer-review, sehingga data yang dihasilkan dapat diandalkan. Sebagai contoh, Asni dan Chairunnisa (2025) dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan sumber yang berkualitas tinggi sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian di bidang BK.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti juga memperhatikan keberagaman perspektif dari berbagai penulis dan institusi. Hal ini penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana model manajemen POAC diterapkan di berbagai jenis sekolah. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur, penelitian ini dapat mengidentifikasi tren dan isu terkini dalam manajemen BK, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan praktik dan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas POAC dalam Layanan BK

Planning

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) dalam layanan bimbingan dan konseling (BK). Dalam konteks pendidikan, perencanaan berbasis need assessment dapat meningkatkan relevansi program yang ditawarkan kepada siswa. Need assessment membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik siswa dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan program yang sesuai. Menurut Asni et al. (2024), penggunaan alat digital assessment dapat memberikan data yang akurat dan terkini mengenai kebutuhan siswa, sehingga program BK yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Sebagai contoh, beberapa sekolah di Indonesia telah mulai mengimplementasikan alat digital untuk melakukan assessment kebutuhan siswa. Misalnya, di SMA Negeri 1 Jakarta, pihak sekolah menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengumpulkan data tentang masalah yang dihadapi siswa, seperti tekanan akademik dan masalah interpersonal. Hasil dari assessment ini kemudian digunakan untuk merancang program konseling yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti workshop tentang manajemen stres dan keterampilan sosial. Hifsy et al. (2022) mencatat bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi siswa dalam program BK, tetapi juga membantu meningkatkan kepuasan siswa terhadap layanan yang diberikan.

Statistik menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan perencanaan berbasis need assessment mengalami peningkatan signifikan dalam efektivitas layanan BK. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dewi (2023), ditemukan bahwa 75% siswa merasa bahwa program BK yang mereka ikuti relevan dengan kebutuhan mereka setelah sekolah mengadopsi pendekatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar mereka.

Namun, tantangan dalam perencanaan ini juga tidak dapat diabaikan. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya, baik dari segi finansial maupun teknis, untuk mengimplementasikan alat digital assessment secara efektif.

Mimhamimdala et al. (2023) mengemukakan bahwa kurangnya pelatihan bagi guru BK dalam menggunakan teknologi digital juga dapat menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada guru BK agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal.

Di sisi lain, penting untuk menekankan bahwa perencanaan yang baik tidak hanya melibatkan pengumpulan data, tetapi juga analisis data yang mendalam untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat. Creswell (2021) menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam perencanaan, di mana hasil assessment harus dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola yang dapat mempengaruhi desain program. Dengan demikian, perencanaan dalam layanan BK harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan siswa.

Organizing

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi kunci dalam model manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) yang memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah. Melalui pengorganisasian yang baik, sumber daya yang ada dapat dikelola secara efisien, sehingga mengurangi pemborosan anggaran hingga 25% (Hifsy et al., 2022). Hal ini sangat penting mengingat banyaknya sekolah yang menghadapi kendala keuangan, sehingga optimalisasi sumber daya menjadi prioritas. Misalnya, dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Mimhamimdala et al. (2023), ditemukan bahwa pengorganisasian yang efektif melibatkan kolaborasi antara guru BK, kepala sekolah, dan orang tua siswa, yang dapat meningkatkan kualitas layanan BK secara keseluruhan.

Dalam konteks pengorganisasian, penting untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi setiap stakeholder yang terlibat dalam layanan BK. Sebagai contoh, pengorganisasian yang melibatkan peran aktif orang tua siswa dan komunitas dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa. Menurut Asni dan Chairunnisa (2025), kolaborasi antara sekolah dan orang tua dapat meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap layanan BK, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan program bimbingan dan konseling. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian yang baik tidak hanya berfokus pada internal sekolah, tetapi juga melibatkan pihak luar yang memiliki kepentingan dalam pendidikan siswa.

Lebih lanjut, pengorganisasian yang efektif juga mencakup penataan struktur organisasi yang jelas dalam layanan BK. Struktur yang baik akan memudahkan alur komunikasi dan koordinasi antar anggota tim. Dalam penelitian oleh Putra dan Dewi (2023), ditemukan bahwa sekolah yang memiliki struktur organisasi BK yang jelas dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan siswa. Misalnya, penugasan spesifik kepada setiap anggota tim BK untuk menangani isu tertentu dapat mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi siswa, sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

Statistik menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pengorganisasian yang baik dalam layanan BK mengalami peningkatan kepuasan siswa dan orang tua. Menurut

data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014), sekolah dengan manajemen BK yang terorganisir dengan baik mencatatkan tingkat kepuasan siswa mencapai 85%, sedangkan sekolah yang kurang terorganisir hanya mencapai 60%. Hal ini menunjukkan bahwa pengorganisasian yang baik tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga pada kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna layanan.

Dengan demikian, pengorganisasian dalam manajemen POAC tidak hanya berfungsi untuk mengurangi pemborosan anggaran, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang mendukung efektivitas layanan BK. Melalui pengorganisasian yang melibatkan semua stakeholder, penataan struktur yang jelas, dan pengelolaan sumber daya yang efisien, layanan BK di sekolah dapat ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sekolah untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada siswa.

Actuating

Actuating dalam konteks manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Salah satu bentuk nyata dari actuating adalah pelibatan wali kelas dalam proses bimbingan. Data menunjukkan bahwa pelibatan wali kelas dapat meningkatkan partisipasi siswa hingga 40% (Hifsy, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ketika wali kelas berperan aktif dalam mendukung program bimbingan dan konseling, siswa merasa lebih diperhatikan dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Dalam implementasi peer counseling di 50 sekolah yang diteliti oleh Hifsy (2022), ditemukan bahwa siswa yang terlibat dalam program tersebut tidak hanya mendapatkan manfaat dari bimbingan yang diberikan, tetapi juga belajar untuk saling mendukung di antara mereka. Peer counseling memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan saling mendukung. Ini juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa, yang merupakan komponen penting dalam pendidikan.

Lebih lanjut, pelibatan wali kelas dalam bimbingan dan konseling juga dapat memperkuat hubungan antara siswa dan guru. Ketika wali kelas terlibat aktif, mereka dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa lebih awal dan memberikan dukungan yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asni dan Chairunnisa (2025), yang menunjukkan bahwa keterlibatan guru dalam program bimbingan dapat meningkatkan kepercayaan siswa terhadap layanan yang diberikan.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan actuating ini juga perlu diperhatikan. Misalnya, tidak semua wali kelas memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya bimbingan dan konseling, yang dapat mempengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi wali kelas agar mereka dapat menjalankan perannya secara optimal (Putra & Dewi, 2023).

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan partisipasi siswa melalui pelibatan wali kelas dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai sekolah. Dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap pendekatan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan bimbingan dan konseling yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen POAC yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Controlling

Controlling merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam memastikan bahwa program bimbingan dan konseling berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Salah satu metode yang efektif dalam controlling adalah melalui evaluasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem evaluasi digital dapat menurunkan 30% kasus tidak tertangani dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah (Anonim, 2025). Dengan memanfaatkan teknologi, sekolah dapat melakukan pemantauan yang lebih efektif terhadap kasus-kasus yang memerlukan perhatian khusus.

Salah satu aplikasi yang telah terbukti efektif adalah BK Analytics, yang terintegrasi dengan Dapodik. Aplikasi ini memungkinkan guru bimbingan dan konseling untuk mengakses data siswa secara real-time, sehingga mereka dapat dengan cepat mengidentifikasi siswa yang mungkin memerlukan bantuan tambahan. Integrasi ini juga mempermudah pengumpulan data dan analisis, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis data (Mimhamimdala et al., 2023).

Selain itu, evaluasi digital tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah, tetapi juga dalam mengukur efektivitas program bimbingan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya data yang akurat, pihak sekolah dapat melakukan penyesuaian terhadap program yang ada untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh Anas (2022), yang menekankan pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kinerja guru BK.

Namun, implementasi sistem evaluasi digital juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa semua sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan akses yang sama terhadap teknologi ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) telah mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan infrastruktur teknologi di sekolah, namun pelaksanaannya masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, fungsi controlling dalam manajemen POAC, terutama melalui penggunaan teknologi, dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dengan melakukan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah tidak hanya dapat menanggapi masalah yang muncul, tetapi juga dapat merancang program yang lebih responsif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan siswa. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan siswa secara keseluruhan.

B. Faktor Penghambat Implementasi

Internal

Implementasi model manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah seringkali dihadapkan pada berbagai kendala internal. Salah satu faktor penghambat yang signifikan adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi para guru bimbingan dan konseling (BK). Menurut penelitian oleh Asni et al. (2024), sekitar 73% guru BK tidak terlatih dalam teknik controlling yang merupakan bagian penting dari manajemen POAC. Ketidakmampuan ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman dalam mengelola dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada siswa.

Selain itu, minimnya sarana pendukung juga menjadi masalah utama dalam implementasi POAC. Banyak sekolah yang tidak memiliki aplikasi manajemen yang diperlukan untuk memfasilitasi kegiatan bimbingan dan konseling. Ruang konseling yang tidak memadai juga menghambat proses konseling yang efektif. Misalnya, dalam suatu studi kasus di SMAN 3 Semarang, Rachmawati (2013) mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang dan fasilitas menyebabkan guru BK kesulitan dalam memberikan layanan yang optimal kepada siswa. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghalang serius dalam pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling.

Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya dukungan dari pihak sekolah dalam hal pengembangan kompetensi profesional guru BK. Menurut Hifsy et al. (2022), banyak sekolah yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru BK. Hal ini berimplikasi pada stagnasi kemampuan guru dalam menerapkan teknik-teknik manajemen yang efektif. Tanpa adanya peningkatan kompetensi, guru BK akan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) menunjukkan bahwa hanya 12% sekolah yang memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sistem manajemen yang terstruktur di banyak institusi pendidikan. Tanpa adanya SOP yang jelas, implementasi fungsi manajemen POAC menjadi tidak terarah dan tidak efektif, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Dalam konteks ini, penting bagi pihak sekolah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelatihan dan pengembangan fasilitas untuk guru BK. Dengan meningkatkan kapasitas internal, diharapkan layanan bimbingan dan konseling dapat lebih efektif dan memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Mengingat peran penting bimbingan dan konseling dalam pendidikan, upaya untuk mengatasi faktor penghambat internal ini harus menjadi prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan.

Eksternal

Faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam penghambatan implementasi model manajemen POAC di layanan bimbingan dan konseling. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakadaan kebijakan sekolah yang memadai. Data menunjukkan bahwa hanya 12% sekolah yang memiliki SOP yang jelas terkait dengan layanan bimbingan dan konseling (Asni et al., 2024). Tanpa adanya kebijakan yang tegas, guru BK sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada siswa.

Ketidakpastian dalam kebijakan juga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Misalnya, jika tidak ada pedoman yang jelas, maka setiap guru BK dapat memiliki interpretasi yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya program bimbingan dan konseling dijalankan. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pendekatan yang digunakan dan mengurangi efektivitas layanan. Menurut Putra dan Dewi (2023), konsistensi dalam implementasi program sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan juga menjadi faktor penghambat. Banyak sekolah yang tidak mendapatkan bantuan atau bimbingan dari pemerintah dalam hal pengembangan program bimbingan dan konseling. Sebagai contoh, dalam penelitian oleh Mimhamimdala et al. (2023), ditemukan bahwa banyak sekolah yang merasa kesulitan dalam mengimplementasikan model manajemen POAC karena tidak adanya dukungan dari kebijakan pemerintah yang relevan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan eksternal sangat penting untuk keberhasilan implementasi program bimbingan dan konseling.

Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan bimbingan dan konseling. Banyak orang tua dan siswa yang masih menganggap bahwa bimbingan dan konseling bukanlah bagian penting dari pendidikan. Menurut Nugroho et al. (2021), rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat bimbingan dan konseling dapat menghambat partisipasi siswa dalam program-program yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya bimbingan dan konseling perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi faktor eksternal ini, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Kebijakan yang jelas dan dukungan yang konsisten dari semua pihak akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas implementasi model manajemen POAC dalam layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, diharapkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa.

C. Model Implementasi Optimal

POAC Plus (Prayitno, 2018)

Model manajemen POAC Plus merupakan pengembangan dari model dasar POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah. Salah satu aspek penting dari POAC Plus adalah integrasi tindak lanjut (follow-up) dalam siklus manajemen, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses manajemen BK tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan tepat. Menurut Prayitno (2018), penerapan model ini memungkinkan konselor untuk melakukan penilaian berkelanjutan terhadap kebutuhan siswa dan efektivitas intervensi yang telah dilakukan.

Data menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan model POAC Plus mengalami peningkatan signifikan dalam kepuasan siswa terhadap layanan konseling. Sebuah studi yang dilakukan oleh Asni dan rekan-rekan (2025) menemukan bahwa 75% siswa di sekolah yang mengimplementasikan model ini merasa lebih puas dengan layanan yang mereka terima, dibandingkan dengan hanya 55% di sekolah yang menggunakan model tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tindak lanjut yang terstruktur dapat meningkatkan kepercayaan siswa terhadap konselor dan layanan yang diberikan.

Contoh konkret dari implementasi POAC Plus dapat dilihat dalam mekanisme case conference yang diadakan secara dwimingguan. Dalam mekanisme ini, para konselor berkumpul untuk membahas kasus-kasus yang telah ditangani, mengevaluasi kemajuan, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Hifsy et al. (2022) melaporkan bahwa case conference yang teratur tidak hanya membantu konselor dalam berbagi informasi dan strategi, tetapi juga meningkatkan kolaborasi antar tenaga pendidik dalam menangani masalah siswa. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi alat yang efektif dalam memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya.

Lebih lanjut, POAC Plus juga mendorong pengembangan kompetensi profesional konselor melalui pelatihan yang berkelanjutan. Penelitian oleh Putra dan Dewi (2023) menunjukkan bahwa konselor yang mengikuti pelatihan berkala mengenai manajemen POAC Plus menunjukkan peningkatan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan program konseling. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga pada pengembangan profesionalisme konselor itu sendiri.

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa penerapan model POAC Plus memerlukan dukungan dari seluruh pihak di sekolah, termasuk manajemen sekolah dan orang tua siswa. Tanpa dukungan yang memadai, implementasi model ini mungkin tidak akan berjalan dengan efektif. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung perkembangan siswa secara holistik (Mimhamimdala et al., 2023).

Digitalisasi POAC

Digitalisasi dalam manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) telah menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penggunaan aplikasi e-BK, yang dirancang untuk mengotomatisasi seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Dengan adopsi teknologi ini, sekolah dapat mengelola data siswa dan program konseling dengan lebih efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pengolahan informasi, dan meningkatkan akurasi data. Menurut Asni dan Chairunnisa (2025), penggunaan aplikasi e-BK dapat meningkatkan efisiensi dokumentasi hingga 40%, yang menunjukkan dampak signifikan dari digitalisasi dalam manajemen BK.

Contoh konkret dari aplikasi e-BK dapat dilihat pada beberapa sekolah di Indonesia yang telah menerapkan sistem ini. Misalnya, di SMAN 1 Jakarta, implementasi aplikasi e-BK memungkinkan guru BK untuk mengakses data siswa secara real-time, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Data yang terintegrasi juga mempermudah analisis tren dan pola perilaku siswa, memungkinkan guru untuk merancang intervensi yang lebih tepat dan efektif (Hifsy et al., 2022).

Digitalisasi juga memungkinkan pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur. Dengan aplikasi e-BK, informasi mengenai kegiatan konseling, hasil asesmen, dan umpan balik dari siswa dapat dikumpulkan dalam satu platform. Hal ini tidak hanya mempermudah guru BK dalam melacak perkembangan siswa, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi program konseling yang sedang berjalan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Putra dan Dewi (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menggunakan sistem digital mengalami peningkatan kepuasan siswa terhadap layanan konseling, dengan 78% siswa merasa lebih terbantu dalam proses konseling.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi digitalisasi ini. Beberapa sekolah masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi staf terkait. Delima et al. (2023) mencatat bahwa kurangnya pemahaman tentang teknologi di kalangan guru BK dapat menghambat efektivitas penggunaan aplikasi e-BK. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan teknis menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal.

Dalam konteks yang lebih luas, digitalisasi dalam manajemen POAC sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) telah mengeluarkan regulasi yang mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, termasuk dalam layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya sekadar tren, tetapi merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan siswa di era digital ini.

Kolaborasi Tripartit

Dalam konteks layanan bimbingan dan konseling (BK) di sekolah, kolaborasi tripartit antara guru BK, wali kelas, dan pihak industri menjadi sangat penting. Sinergi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga memastikan bahwa program yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan siswa secara holistik. Menurut Asni dan Chairunnisa (2025), kolaborasi ini dapat memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga setiap langkah yang diambil dalam program BK dapat diukur dan dievaluasi secara sistematis.

Sebagai contoh, di salah satu sekolah menengah atas di Jakarta, program kolaboratif antara guru BK dan wali kelas berhasil meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan melibatkan pihak industri, sekolah dapat menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan, yang tidak hanya bermanfaat bagi siswa dalam konteks akademis tetapi juga dalam persiapan karir mereka (Putra & Dewi, 2023). Data menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam kegiatan ini meningkat hingga 30% setelah implementasi program kolaboratif tersebut.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam kolaborasi ini adalah komunikasi yang efektif antara ketiga pihak. Hifsy et al. (2022) mencatat bahwa seringkali terdapat kesenjangan dalam pemahaman antara guru BK dan wali kelas mengenai tujuan program BK. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan bersama yang fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Hal ini dapat membantu dalam merumuskan strategi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, penting juga untuk melibatkan orang tua siswa sebagai bagian dari kolaborasi tripartit. Dengan melibatkan orang tua, informasi yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai kebutuhan siswa. Rachmawati (2013) menekankan bahwa dukungan orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program BK, sehingga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting.

Akhirnya, untuk memastikan keberlanjutan kolaborasi ini, perlu ada sistem evaluasi yang jelas. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Menurut Mimhamimdala et al. (2023), penggunaan teknologi dalam pengumpulan data evaluasi dapat mempermudah proses ini, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model manajemen POAC efektif dalam meningkatkan kualitas layanan BK di sekolah jika diimplementasikan secara sistematis. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. *Pertama*, pelatihan yang memadai bagi guru BK dalam manajemen POAC sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Anas (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan kompetensi guru BK akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada siswa.

Kedua, penyediaan sarana digital yang memadai juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi POAC. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam layanan BK dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi mobile untuk konseling dapat memudahkan siswa dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke sekolah (Pratiwi & Mulyono, 2023).

Ketiga, komitmen dari kebijakan sekolah juga berperan penting dalam mendukung implementasi model manajemen ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2014) telah mengeluarkan regulasi yang mendorong sekolah untuk mengadopsi pendekatan manajemen berbasis POAC, namun tanpa komitmen yang kuat dari pihak sekolah, implementasi tersebut akan sulit terlaksana dengan baik.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pengembangan modul "POAC Plus" yang terintegrasi dengan teknologi. Modul ini tidak hanya akan memberikan panduan praktis bagi guru BK, tetapi juga dapat mencakup pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam layanan BK. Dengan pendekatan ini, diharapkan kualitas layanan BK di sekolah dapat meningkat secara signifikan, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. (2022). Efektivitas fungsi manajemen POAC terhadap kinerja guru BK. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 22–29.
- Asni, A., & Chairunnisa, D. (2025). The role of POAC management functions in enhancing the quality of counseling guidance services for students in schools in Indonesia. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(1), 89–101. <https://doi.org/10.29210/1138100>
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Delima, R., et al. (2023). Challenges in implementing POAC management in school counseling. *Journal of Educational Management and Innovation*, 5(2), 78–89.
- Hifsy, I., Firman, & Neviyarni. (2022). Implementasi manajemen bimbingan dan konseling (POAC) untuk pelayanan bimbingan konseling yang efektif. *Education & Learning*, 2(2), 74–78. <https://doi.org/10.57251/el.v2i2.386>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemendikbud.
- Mimhamimdala, F., et al. (2023). POAC Plus sebagai solusi permasalahan manajemen BK di sekolah. *Jurnal Ristekdik*, 8(3), 424–432.
- Pratiwi, F., & Mulyono, S. (2023). Peningkatan kualitas layanan BK melalui pelaksanaan fungsi manajemen POAC. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 7(2), 78–85.
- Prayitno. (2018). *Bimbingan dan konseling di sekolah*. UNP Press.
- Putra, A. R., & Dewi, N. (2023). The adaptive application of POAC in school counseling management. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 11(2), 101–112.
- Rachmawati, U. (2013). Manajemen BK tanpa alokasi jam pembelajaran di SMAN 3 Semarang. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 2(1), 57–67.